

**PENGARUH NATIONAL RIFLE ASSOCIATION DALAM PENOLAKAN
ARMS TRADE TREATY DI AMERIKA SERIKAT**

Oleh: Raditia Sapta Candra

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: raditia.sapta.2012@fisipol.umy.ac.id

Abstract

Violation of human rights, and crimes which happened around the world can be traced back to misuse of arms. Based on that, United Nations formulate a treaty that can regulate and control the trade, distribution, and use of these weapons. The United Nation's Arms Trade Treaty seeks to establish the highest possible common international standards for regulating the nternational trade in conventional arms, prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and prevent their diversion for the purpose of contributing to international and regional peace, security and stability. The member states of United Nations are mostly in favor for such treaty, but unfortunately there are also some states that reject to ratify the treaty, including United States of America. This article will attempt to explain the reason of United States of America rejection of the Arms Trade Treaty.

Keywords: *arms, trade, treaty, interest group, foreign policy*

PENDAHULUAN

Di Amerika Serikat, *Interest Group* merupakan sebuah intitusi politik yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi arah sebuah keputusan. Dalam kasus penolakan ratifikasi *Arms Trade Treaty* yang bertujuan untuk meregulasi perdagangan dan peredaran senjata didunia oleh Amerika Serikat, *National Rifle Association* merupakan salah satu kelompok yang kepentingannya dipengaruhi oleh keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Amerika Serikat untuk perjanjian internasional ini.

ARMS TRADE TREATY DAN AMERIKA SERIKAT

Arms Trade Treaty merupakan sebuah perjanjian untuk membuat sebuah standar internasional yang mengotrol arus perdagangan senjata konvensional yang bertujuan mengurangi pelanggaran pada hak-hak asasi manusia. Dengan menjadikan perjanjian ini sebagai sebuah hukum atau standar internasional, diharapkan ini dapat berpengaruh secara signifikan untuk nantinya meniadakan atau setidaknya mengurangi jumlah penggunaan dan perdagangan senjata yang berpotensi dimanfaatkan dalam tindakan illegal, kriminal, maupun pelanggaran hak asasi manusia diseluruh dunia. Usulan untuk membuat regulasi untuk mengatur arus perdangan senjata internasional sudah dicetuskan sejak tahun 90-an namun pembentukannya sendiri baru dimulai pada tahun 2006 yang diprakarsai oleh Persatuan Bangsa Bangsa. Setelah proses panjang dalam perumusan draft perjanjian tersebut, akhirnya pada tanggal 2 April 3 2013 *Arms Trade Treaty* resmi disahkan oleh *United Nations* dan mulai terbuka untuk ditandatangani sejak 3 Juni, 2013 dan kemudian perjanjian ini mulai diberlakukan pada 2014.

Mayoritas Negara yang tergabung dalam Persatuan Bangsa Bangsa menyetujui dan meratifikasi traktat ini. Pada November 2015, terhitung 78 negara telah meratifikasi atau menyetujui pemberlakuan *Arms Trade Treaty* dan 54 negara lainnya telah menandatangani tapi tidak meratifikasi traktat ini, juga terdapat 3 negara anggota yang menolak perjanjian ini. Amerika Serikat merupakan salah salah satu negara yang

ikut menandatangani perjanjian ini namun tidak meratifikasi perjanjian ini kedalam hukum domestiknya.

Penolakan ratifikasi *Arms Trade Treaty* oleh Amerika Serikat kemudian menimbulkan pertanyaan, disamping statusnya sebagai Dewan keamanan di *United Nation* yang notabene untuk memprosikan dan menjaga perdamaian internasional, Amerika Serikat juga memiliki permasalahan dalam negeri yang berkaitan dengan senjata api seperti pembunuhan, perampokan, konflik antar gang dan bahkan penambahan masal. Tindak kejahatan yang terjadi ini bukanlah dalam jumlah yang kecil, akan tetapi sangat besar dan terjadi hampir diseluruh wilayah Amerika Serikat. Kemudian ini juga ditambah dengan besarnya jumlah senjata api yang beredar di masyarakat dimana hampir 1/3 dari jumlah keseluruhan warga Amerika Serikat memiliki senjata api.

Tindakan yang diambil pemerintah dalam negeri dalam menanggapi permasalahan ini dianggap oleh beberapa pihak kurang efektif dalam mengatasi permasalahan ini. Presiden Obama mengajukan Rancangan Undang Undang untuk mengurangi tingkat peredaran senjata di masyarakat namun kemudian ditolak oleh Kongres Amerika Serikat yang akhirnya memaksa Obama untuk bertindak sendiri dengan mengeluarkan sejumlah *executive actions* yang mampu mengetatkan arus perdagangan senjata api, akan tetapi tanpa persetujuan tertulis dari Kongres tindakan tersebut tidak dapat bertahan lama dan akan dapat dihapus oleh Kongres. ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, ketika tingkat kejahatan bersenjata begitu tinggi di Amerika Serikat dan dukungan publik yang menuntut untuk adanya regulasi yang lebih ketat untuk peredaran senjata api mengapa Amerika Kemudian malah menolak untuk meratifikasi *Arms Trade Treaty* yang dapat membantu mengontrol peredaran senjata.

Faktor utama yang menjadikan Amerika Serikat menolak untuk meratifikasi perjanjian tersebut adalah karena adanya tekanan yang diberikan oleh *National Rifle*

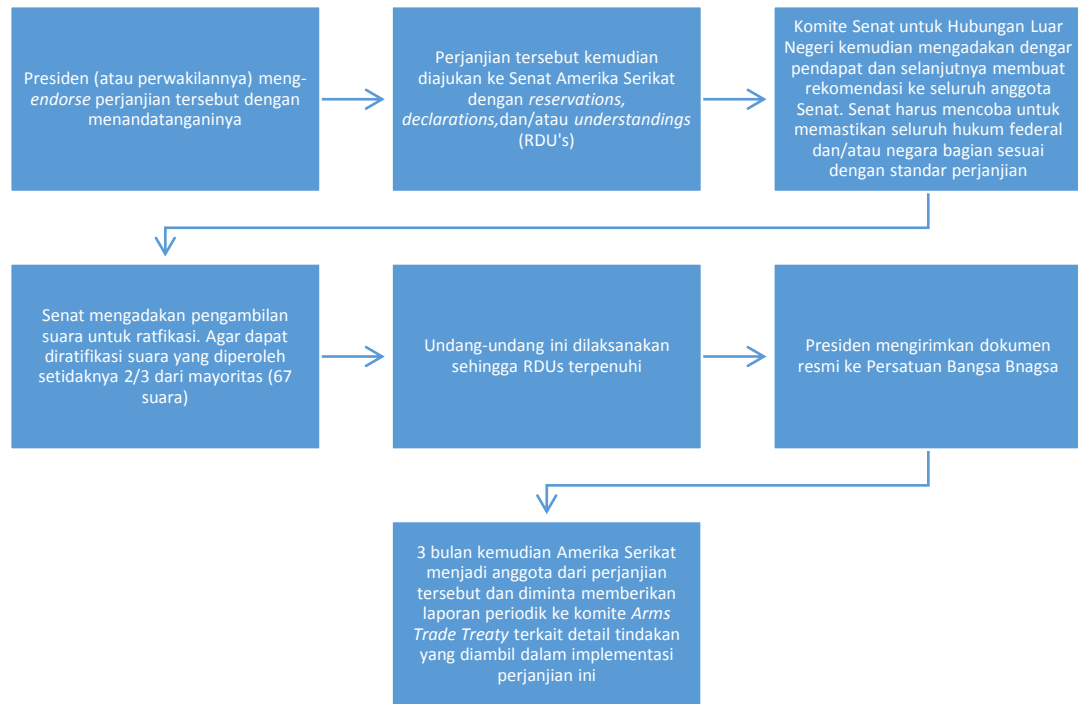
Association, sebuah interest group dengan fokus isu mengenai senjata. Kelompok kepentingan ini terbukti banyak mempengaruhi keputusan yang berkaitan senjata dimana mereka mempromosikan aturan yang lebih longgar dan leluasa untuk kepemilikan dan penggunaan senjata serta menentang setiap isu dan tindakan yang berkaitan dengan gun-control.

Kelompok kepentingan akan menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan *interest*-nya. Terdapat berbagai konsep yang diutarakan oleh para ahli yang digunakan untuk mendeskripsikan tindakan yang diambil oleh kelompok kepentingan. Salah satunya adalah yang diungkapkan oleh Kay Lawson, dimana “kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi kegiatan pemerintah, dengan meyakinkan orang-orang yang memiliki posisi dalam pemerintahan, agar bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan kelompok” (Lawson, 2004). *National Rifle Association* sebagai sebuah kelompok kepentingan terbukti menyampaikan pengaruhnya dengan menggunakan lobby pada orang-orang yang memiliki posisi di Kongres Amerika Serikat agar dapat memenuhi kepentingannya.

ALUR PROSES RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

Untuk memahami bagaimana *National Rifle Association* sebagai sebuah kelompok kepentingan mampu mempengaruhi keputusan Amerika Serikat dalam kasus penolakan ratifikasi dari Arms Trade Treaty, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai bagaimana proses ratifikasi untuk sebuah perjanjian internasional di Amerika Serikat. Berikut merupakan alur ratifikasi dari perjanjian internasional

Tabel 1: Proses ratifikasi perjanjian internasional di Amerika Serikat



Sumber: (Human Rights Watch).

Agar sebuah perjanjian internasional dapat diratifikasi kedalam hukum domestik Amerika Serikat, ia harus mendapat persetujuan dari Kongres Amerika Serikat dengan mengikuti alur yang dicantumkan diatas.

Seperti yang diperlihatkan dalam alur proses ratifikasi diatas, Presiden sama sekali tidak memiliki keterlibatan langsung dalam penentuan apakah sebuah perjanjian internasional dapat diadopsi kedalam hukum dalam negeri Amerika Serikat kecuali dalam penandatanganan diawal saat *endorsing* dan diakhir ketika perjanjian tersebut resmi diratifikasi oleh negara apabila disetujui oleh Kongres. Ini artinya Kongres Amerika Serikat memiliki kewenangan penuh dalam menilai dan menentukan perjanjian tersebut akan diratifikasi atau tidak. Kongres Amerika Serikat, khususnya Komite Senat untuk Hubungan Luar Negeri, dalam proses penentuannya akan menilai

beberapa aspek dari dampak yang terjadi apabila perjanjian tersebut diterapkan, diantaranya:

- keuntungan dari kebijakan tersebut dan kemungkinan bahaya dari penerapannya di Amerika Serikat;
- adanya dampak terhadap peraturan atau lingkungan yang signifikan;
- analisa dari isu-isu yang muncul dalam implementasi perjanjian (contohnya apakah perjanjian tersebut efektif dengan sendirinya atau memerlukan regulasi domestik yang sesuai agar dapat diterapkan).

Sebagai tambahan, Komite mungkin mengajukan sebuah set dari *RDU's*, yaitu *Reservations* yang merupakan pembatasan dalam komitmen yang dilakukan, *Declarations* dan *understandings* merupakan pernyataan yang dibuat untuk menyampaikan pemahaman suatu negara dalam materi yang terkandung atau penafsiran ketentuan tertentu dalam perjanjian tersebut. Perubahan tersebut termasuk penambahan, pengurangan, atau penghapusan dalam bahasa maupun substansi yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat dalam meratifikasi perjanjian ini.

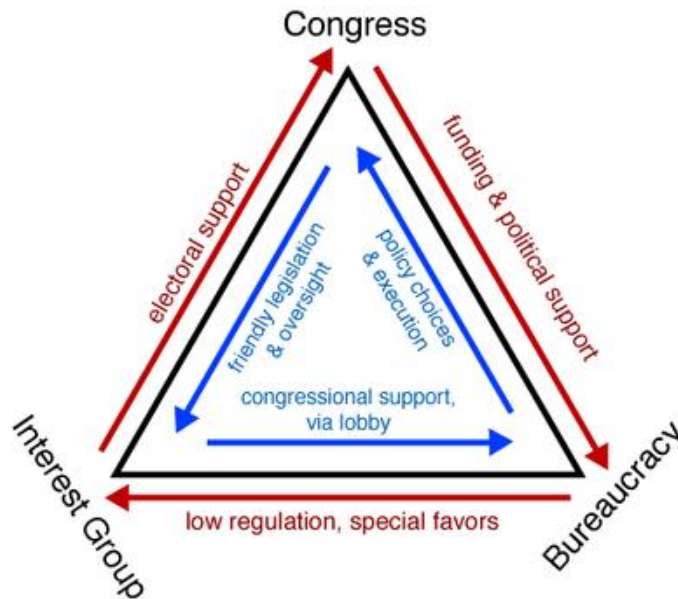
Selanjutnya dengan perjanjian yang sudah dimasukkan ke Kongres Amerika Serikat, Komite Senat untuk Hubungan Luar Negeri dapat memulai penilaiannya. Mereka dapat memberikan *vote* untuk mengirimkan perjanjian ini ke Senat Amerika Serikat untuk ditindak lanjuti dengan rekomendasi yang menguntungkan atau tidak, ataupun dengan tanpa rekomendasi sama sekali, mereka juga dapat mengabaikan perjanjian ini sepenuhnya. Akan tetapi apabila Komite gagal untuk menindaklanjuti perjanjian ini, maka perjanjian ini tidak akan dikembalikan ke Presiden. Selain itu tidak seperti langkah-langkah *legislative* lainnya yang akan langsung gugur apabila tidak ditindaklanjuti, sebuah perjanjian akan tetap berada dan tersedia di Senat Amerika Serikat dari satu masa jabatan Kongres ke masa jabatan selanjutnya sampai perjanjian tersebut secara resmi digugurkan atau ditarik kembali oleh Presiden (Convention on the Right of the Child, 2016).

Kemudian ketika Komite Senat untuk Hubungan Luar Negeri ke seluruh anggota Senat, Senat Amerika Serikat akan mempertimbangkan untuk memberikan *Advice and Consent* ataupun persetujuannya. Untuk mencapai persetujuan dari Senat dibutuhkan 2/3 suara yang mendukung, yaitu sebanyak 67 suara. Senat juga mungkin baru akan memberikan persetujuannya dengan persyaratan memasukkan perubahan terhadap teks perjanjian, memasukkan *RDU's* yang sudah disetujui, ataupun dengan pernyataan lain.

Apabila proses di Senat sudah dijalani, maka masuk ke langkah terakhir dari proses ratifikasi, dimana hanya Presiden, bertindak sebagai kepala diplomat dari Amerika Serikat, yang memiliki kewenangan untuk meratifikasi perjanjian. Dengan persetujuan Senat, Presiden kemudian dapat melanjutkan proses formal ratifikasi. Yaitu menanda tangani dan mengirimkan dokumen, dengan persetujuan Pemerintah Amerika Serikat untuk mematuhi perjanjian, serta setiap *RDU's*, ke Persatuan Bangsa Bangsa yang menandakan Amerika Serikat setuju untuk terikat dengan perjanjian tersebut.

Kongres Amerika Serikat dalam aktifitasnya banyak berinteraksi dengan pihak-pihak lain yaitu Birokrasi dan juga Kelompok Kepentingan. Interaksi ini dalam politik Amerika Serikat dikenal sebagai *Sub-government* atau *Iron Triangle* dimana hubungan antara ketiga institusi ini bersifat saling menguntungkan sehingga ini menjadikan hubungan tersebut kuat dan sulit untuk ditembus. Dalam pembahasan ini, penulis akan menitikberatkan pada hubungan antara 2 institusi yaitu antara Kongres dan Kelompok Kepentingan.

Tabel 2: ilustrasi iron triangle



Sumber: (Politik dan Pemerintahan Amerika).

KELOMPOK KEPENTINGAN KE KONGRES

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa salah satu cara agar sebuah *Interest Group* dapat mencapai kepentingannya adalah dengan meyakinkan orang-orang yang memiliki posisi penting di Kongres Amerika Serikat, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah ‘bagaimana cara *Interest Group* untuk ‘meyakinkan’ orang dengan posisi tersebut. Disebutkan dalam skema *Iron Triangle* diatas bentuk dari hubungan yang diberikan oleh *Interest Group* terhadap Kongres adalah berupa *electotral support* dimana kelompok kepentingan memberikan dukungan kepada politisi atau calon politisi yang dianggap mampu menyampaikan kepentingannya di Kongres. Dalam kasus ini *National Rifle Association* akan memberi dukungannya kepada politisi, baik *senate* maupun *representative*, yang diharapkan dapat mewakili kepentingan dari kelompok tersebut dalam isu yang terkait dengan senjata, lebih

spesifiknya adalah isu yang berkaitan dengan kemudahan untuk peredaran, pemilikan, dan penggunaan senjata serta menghalangi adanya kontrol yang lebih ketat untuk senjata.

Seperti yang disebutkan oleh Prof. Dr. Bambang Cipto bahwa masa pemilihan adalah kegiatan yang rentan akan pengaruh dari Kelompok Kepentingan (2003), dimana *National Rifle Association* akan mencari dan/atau dicari oleh politisi yang mampu menjadi perwakilan bagi kelompok ini dalam isu terkait. Kemudian setelah politisi yang sesuai didapat maka *National Rifle Association* akan menawarkan dukungannya yang apabila diterima oleh politisi tersebut maka kelompok ini akan memberikan dukungannya yang biasanya berupa *funding* untuk membiayai kampanye pemilihan misalnya pembuatan iklan dan lainnya. Sponsor ini dilakukan oleh *Political Action Committee* dari *National Rifle Association* yaitu *NRA-Institute for Legislative Action* yang merupakan divisi *lobbying* dan kampanye, selain itu tidak jarang juga apabila memungkinkan *National Rifle Association* akan menghimbau massanya untuk memberikan suara pada politisi yang ditunjuk.

Dalam laporan yang diberikan oleh *Center for Responsive Politics* menyebutkan bahwa pada 2012 *NRA-Institute for Legislative Action* menghabiskan dana sebesar \$7.5 juta dalam *federal election*. Dana tersebut ditujukan kepada 66 kandidat dari seluruh negara bagian yang mendapat *endorse* dari *National Rifle Association* (National Rifle Assn, 2012). Tujuan dari *National Rifle Association* yang rela menggelotorkan dana yang besar adalah karena kelompok kepentingan ini memahami apa yang diinginkan oleh para politisi tersebut, yaitu mampu masuk kedalam menjadi bagian dari Kongres Amerika Serikat dan/atau memperthankan posisinya disana. Selanjutnya, politisi Kongres yang mendapat dukungan dari *National Rifle Association* akan menjadi representatif bagi kelompok ini dalam menyampaikan kepentingannya dalam isu mengenai senjata seperti yang menjadi pembahasan dari tulisan ini yaitu ratifikasi *Arms Trade Treaty*.

Dengan sumber daya seperti yang disebutkan diatas juga dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *National Rifle Association* merupakan sebuah kelompok kepentingan yang kuat dimana ia mampu mempengaruhi penilaian Kongres untuk berpihak atau menguntungkan mereka dan juga cukup mempengaruhi kesempatan bagi anggota Kongres untuk dapat terpilih kembali sebagai balasannya dalam mendukung program mereka.

KONGRES KE KELOMPOK KEPENTINGAN

Bentuk dari hubungan yang diberikan oleh Kongres ke Kelompok Kepentingan adalah berupa kemudahan legislasi dalam meloloskan hukum maupun peraturan yang menjadi fokus atau menguntungkan bagi kepentingan dari *interest group*, ini dilakukan oleh para politisi yang mendapat dukungan dari kelompok kepentingan yang mendukung mereka.

Anggota Kongres yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah Senat Amerika Serikat karena badan legislative inilah yang mempunyai wewenang dalam membahas ratifikasi dari perjanjian internasional. Bagi anggota Senat yang sedang menjabat di Kongres (*incumbent*), terpilih kembali untuk menjabat adalah salah satu tujuan mereka agar dapat memenuhi ambisi pribadi mereka. Kemampuan dari Kelompok Kepentingan untuk mempengaruhi kesempatan bagi anggota Kongres untuk terpilih kembali sangat menguntungkan bagi seorang anggota Kongres, karena itu mereka berusaha untuk mendapat dukungan politik dan elektoral dari kelompok kepentingan yang kuat.

National Rifle Association merupakan salah satu kelompok kepentingan yang mempunyai sumber daya untuk mempengaruhi penilaian Kongres. Selain dengan dana yang memadai, dukungan elektoral yang dimiliki kelompok ini juga patut diperhitungkan, dengan jumlah lebih dari 5juta anggota yang tersebar diseluruh negara. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dari penduduk

Amerika Serikat akan terlihat sangat kecil, namun apabila dilihat dari partisipasi politik keseluruhan penduduk Amerika Serikat akan berbeda hasilnya. Meskipun dianggap sebagai *pioneer* dalam demokrasi, partisipasi politik dari warga Amerika Serikat cukup rendah dibandingkan negara-negara demokrasi lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *PewResearchCenter.org* pada 34 negara dalam masa pemilihan dimasing-masing negara, tingkat partisipasi dari warga Amerika Serikat tercatat hanya 53,6% dari 84,3% pemilih yang terdaftar dimana 15% sisanya tidak terdaftar (Desilver, 2015), dilihat dari sini jumlah 5 juta anggota yang tersebar diseluruh negara bagian akan cukup berpengaruh.

Tabel 3: Tingkat partisipasi politik selama 10 musim pemilihan terakhir

Tahun	Partisipasi Politik
1976	53.6%
1980	52.8%
1984	53.3%
1988	50.3%
1992	55.2%
1996	49.0%
2000	50.3%
2004	55.7%
2008	57.1%
2012	53.6%

Sumber: (McElwee).

Selain itu *National Rifle Association* juga merupakan sebuah komunitas sosial dimana banyak orang dengan pengaruh kuat di Washington bergabung didalamnya dan juga saling mendukung, yang mana apabila seorang politisi Senat dapat bergabung didalamnya dapat memperluas relasi dan juga memungkinkan mendapat dukungan politik. Dengan keuntungan-keuntungan yang disebutkan diatas maka tidak aneh

apabila terdapat anggota Senat yang sangat pro terhadap agenda-agenda *National Rifle Association*.

Tindakan Senat Amerika Serikat Dalam Menanggapi *Arms Trade Treaty*

Sebelum penandatanganan perjanjian ini, Senat Amerika Serikat sudah melakukan pembahasan mengenai isu ratifikasi dari *Arms Trade Treaty*, ini dilakukan pada sepertiga awal tahun 2013. Pada saat itu Presiden Obama masih berpendapat untuk mempertimbangkan posisinya dalam isu ini, namun tendensi beliau untuk mengkomodasi perjanjian ini sangat memungkinkan. Hal ini menghasilkan kritik dari anggota partai Republik untuk Presiden Obama, walaupun beliau sendiri menyatakan tidak akan memihak pada apapun yang akan menciderai amendemen ke-2.

Kemudian pada 2 Maret 2013 Sabtu pagi pukul 3 pagi, Senator James Inhofe (*Republic-Oklahoma*) mengajukan sebuah amendemen, dimana amendemen itu akan mencegah Amerika Serikat masuk dalam *Arms Trade Treaty* dari Persatuan Bangsa Bangsa demi melindungi Amendemen ke-2. Meskipun Bob Menendez (*Democrat-New Jersey*) selaku ketua dari Komite Senat untuk Hubungan Luar Negeri berpendapat tindakan *voting* untuk menentukan pertimbangan bagi kebijakan luar negeri yang besar dipagi buta sangat tidak bertanggung jawab, amendemen yang diajukan oleh Senator James Inhofen ternyata lolos dengan suara 53-46 (Cox, 2013).

Walaupun setelah Senat menyatakan bahwa ia tidak akan mendukung *Arms Trade Treaty*, penandatanganan *Arms Trade Treaty* yang diwakili oleh *Secretary of State* John Kerry selaku perwakilan dari Amerika Serikat tetap dilakukan. Dalam pernyataannya John Kerry menyatakan bahwa selaku perwakilan bagi Presiden Obama, dia menyadari pentingnya perjanjian ini untuk menghapuskan perdagangan senjata konvensional secara ilegal. Beliau menyatakan bahwa perjanjian ini adalah tentang menjauhkan senjata dari tangan para teroris dan pembunuh, serta mengurangi resiko terjadinya transfer senjata secara internasional yang kemudian digunakan dalam tindakan kriminal paling kejam di dunia, dan juga untuk menjaga warga negara

Amerika Serikat juga agar menjaga Amerika Serikat tetap kuat. beliau juga menyatakan ini merupakan usaha untuk menjaga perdamaian dunia, mempromosikan kemanan dunia juga memajukan tujuan-tujuan kemanusiaan.

Secretary of United State juga menyatakan bahwa perjanjian ini tidak akan menghilangkan kebebasan siapapun. Bahkan perjanjian ini mengakui kebebasan baik individual maupun negara untuk mendapatkan, memiliki, dan menggunakan senjata api untuk tujuan yang sah. Beliau menyatakan agar tidak membuat asumsi bahwa pemerintah akan menyetujui perjanjian yang tidak sejalan dengan hak-hak warga Amerika Serikat. Menurut beliau, perjanjian ini memperkuat keamanan bangsa dan membangun keamanan global tanpa meronrong perdagangan senjata internasional yang sah dimana ia memperbolehkan negara untuk mengadakan senjata bagi pertahanannya (Kerry, 2013). John Kerry juga memberikan ketentuan atau *redlines* yang harus menjadi kriteria dari *Arms Trade Treaty* agar Amerika Serikat dapat meratifikasinya.

Gambar 1: Kriteria yang diberikan Amerika Serikat untuk Arms Trade Treaty



Sumber: (U.S. Department of Justice).

Kemudian menanggapi hal ini, pada 15 Oktober 2013 Senator Jim Inhofe (*Republik-Okla*) bersama dengan Senator Jim Moran (*Republik-Kansas*) dan Joe Manchin (*Demokrat-West Virginia*) memimpin 50 senator lainnya dalam mengulangi pernyataan mereka kepada Presiden Obama dimana mereka sangat menentang ratifikasi perjanjian ini dan tidak akan terikat dalam hal apapun oleh *Arms Trade Treaty*. Selanjutnya sebuah surat yang berisikan alasan dari para senator dalam menolak ratifikasi ditujukan kepada Presiden Obama. Ada 6 alasan yang menjadi faktor utama dalam penolakan oleh para senator:

1. seperti yang disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa, perjanjian ini gagal mencapai konsensus dalam Majelis Umum yang diadakan oleh Persatuan Bangsa Bangsa. Otomatis perjanjian ini tidak memenuhi kriteria yang diajukan oleh Pemerintahan Obama;
2. perjanjian ini memungkinkan terjadinya amendemen dengan syarat mencapai suara mayoritas 2/3 dari keseluruhan Senat. Ini akan menghalangi tugas Senat untuk menyediakan nasihat dan persetujuan (*advice and consent*) dalam menilai sebuah perjanjian sebelum diasumsikan oleh Amerika Serikat;
3. perjanjian ini hanya menyediakan acuan lemah dan tidak mengikat untuk kepemilikan, penggunaan, serta perdagangan senjata yang sah, bahkan tindakan tersebut tidak disebutkan didalam perjanjian, apalagi pembelaan diri secara individual yang merupakan hak fundamental bagi individu. Ini akan menjadi ancaman bagi Amendemen Ke-2;
4. Departemen Luar Negeri (*The State Department*) mengakui bahwa perjanjian ini ambigu. Dengan menjadi bagian dari perjanjian ini berarti memasukkan Amerika Serikat dalam sebuah komitmen yang tidak jelas;
5. Kriteria yang dimiliki perjanjian ini samar dan mudah dipolitisasi. Ini melanggar hak warga Amerika Serikat, yang diatur oleh Konstitusi, untuk untuk bebas mengatur diri mereka sendiri. Bahasa (kata/kalimat) yang digunakan membatasi kemampuan Amerika Serikat untuk melakukan kebijakan luar negerinya sendiri dan memungkinkan kekuasaan yang berasal dari luar untuk memaksakan penilaian ataupun control terhadap Amerika Serikat; dan
6. Departemen Luar Negeri telah mengakui bahwa perjanjian ini menggunakan bahasa (kata/kalimat) yang dapat menghambat Amerika Serikat untuk memenuhi komitmen strategis, hukum dan moral untuk menyediakan senjata bagi sekutunya seperti Taiwan dan Israel.

Surat ini ditandatangani oleh 53 senator dari kedua partai untuk lengkapnya dapat dilihat dalam lampiran (James M. Inhofe, 2013).

Dari kejadian diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara Presiden dan Kongres tidak terlalu kondusif, dimana hal ini berakibat buruk bagi Presiden Obama. Karena meskipun Presiden adalah seorang *Chief Legislator* yang memiliki kekuasaan eksekutif akan tetapi Kongres adalah badan yang memiliki kewenangan dalam pembuatan undang-undang, Presiden hanya mampu memprakarsai usulan dan inisiatif dan Kongres lah yang nantinya mewujudkan usulan tersebut atau menolaknya (Prof. Dr. Bambang Cipto, 2003). Penolakan oleh kongres juga terjadi dalam upaya Presiden dalam menerapkan control yang lebih ketat terhadap senjata dengan memperluas wilayah pemeriksaan latar belakang calon pembeli pada 2013 lalu, ini kemudian menjadikan Presiden bertindak tanpa persetujuan Kongres dalam mengeluarkan *executive actions*.

Penolakan dari Kongres untuk ratifikasi dari *Arms Trade Treaty* tetap berlanjut. Pada 1 Januari 2014 Senator Jerry Moran (*R-Kan*) mengumumkan bahwa *Omnibus Bill* yang diajukan akan mencegah penerapan *Arms Trade Treaty* dari Persatuan Bangsa Bangsa. *Omnibus Bill* adalah tipe rancangan undang-undang yang mencakup berbagai hal yang terdiri dari pembahasan beberapa isu sekaligus, rancangan undang-undang ini bisa mencapai lebih dari 1000 halaman. Karena waktu untuk membahas dan memperdebatkan kepantasan dari rancangan undang-undang ini terbatas dihari terakhir dari rapat pembahasan pemberian dana, biasanya rancangan undan-undang ini akan langsung diloloskan. Contohnya adalah *The Omnibus Appropriations Act* pada tahun 2009 yang kontroversial karena memakan dana sebesar \$410 triliun (Roll Call, 2009). Termasuk didalam *Omnibus Bill* ini adalah rancangan undang-undang yang akan melarang adanya pendanaan dalam segala hal yang terkait dengan perjanjian ini kecuali *Arms Trade Treaty* diratifikasi oleh Senat Amerika Serikat, yang mana Senat sangat menentang gagasan untuk meratifikasi perjanjian ini (Jerry Moran, 2014).

“None of the funds appropriated by this Act may be obligated or expended to implement the Arms Trade Treaty until the Senate approves a resolution of ratification for the Treaty.” The Omnibus Appropriation Bill Section 7075

Kemudian sesuai dengan Artikel 22 yang tercantum pada *Arms Trade Treaty* dimana 90 hari setelah perjanjian ini diratifikasi oleh 50 negara maka *Arms Trade Treaty* akan resmi diberlakukan, ini terjadi pada 2 Desember 2014. Mengikuti hal ini Senator Moran dan Inhofe memimpin para senator baru dalam pernyataannya bahwa tindakan oposisi yang dilakukan Senat Amerika Serikat tetap kuat diman terdapat 12 senator baru yang turut menjadi bagian dari 55 senator yang melakukan penentangan terhadap ratifikasi *Arms Trade Treaty*. Dalam penyuaran kembali penentangan ini, Senat kembali mengirimkan surat kepada Presiden Obama yang menyatakan oposisi terhadap ratifikasi *Arms Trade Treaty* akan tetap kuat dan Senat tidak akan terikat oleh ketentuan-ketentuannya (Jerry Moran, 2015).

Tindakan yang dilakukan oleh Senat ini kemudian menghasilkan sebuah situasi politik dalam negeri yang kemudian menentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Seperti yang diutarakan oleh William D. Coplin dimana terdapat 3 determinan yang menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakn yang diambil, yaitu situasi politik dalam negeri; kondisi ekonomi dan militer; serta konteks internasional (William D. Coplin, Mercedes Marbun, 2003). Hingga akhir tahun 2015, Senat tetap menentang usaha untuk meratifikasi *Arms TradeTreaty*. Ini menjadikan Amerika Serikat secara resmi tidak meratifikasi perjanjian ini meskipun pemerintahan Obama mendukung *Arms TradeTreaty*.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa para senator ini memahami bahwa *National Rifle Association* memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mempengaruhi penilaian Kongres. Untuk itu mereka mencari dukungan dari kelompok kepentingan ini dengan mempermudah legislasi yang akan mewujudkan kepentingan

mereka. Dilain pihak *National Rifle Association* seperti yang disebutkan oleh Kay Lawson bahwa kelompok kepentingan akan meyakinkan orang yang memiliki posisi dalam pemerintahan agar dapat mempengaruhi pemerintah. Untuk mampu meyakinkan orang dengan posisi ini, *National Rifle Association* kemudian lewat *Political Action Center*-nya yang bertindak sebagai *lobbyist* dalam memberikan dukungannya kepada orang yang memiliki dan/atau akan memiliki posisi di pemerintahan. Ini bisa ditunjukkan lewat tabel dibawah dimana nama-nama tersebut adalah pihak yang diberikan dukungan berupa *funding* dan juga dukungan politik dalam masa pemilihan 2012. Ini sesuai dengan model interaksi yang dtunjukkan oleh *iron triangle*.

Tabel 4: Daftar nama penerima dana dari National Rifle Association dalam masa pemilihan 2012

Name	Office	Total contribution
Cruz, Ted (R-Texas)	Senate	\$9,900
Heller, Dean (R-Nevada)	Senate	\$9,900
Barrasso, John A (Republic -Wyoming)	Senate	\$9,899
Wicker, Roger (R-Mississippi)	Senate	\$7,450
Manchin, Joe (Democart-West Virginia)	Senate	\$6,500
Hatch, Orrin G (R-Utah)	Senate	\$5,000
Corker, Bob (R-Tennessee)	Senate	\$4,950
Ayotte, Kelly (R-New Hampshire)	Senate	\$1,500
Moran, Jerry (Republic-Kansas)	Senate	\$1,000
Johnson, Ron (R-Wisconsin)	Senate	\$1,000
McConnell, Mitch (R-Kentucky)	Senate	\$1,000
Cornyn, John (R-Texas)	Senate	\$500

Sumber: (Center for Resposive Politics, 2012)

Seluruh nama-nama diatas terbukti mendukung kepentingan *National Rifle Association* dalam menentang *Arms Trade Treaty*, salah satu indikasinya adalah

mereka turut menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden Obama untuk tidak meratifikasi *Arms Trade Treaty*. Kemudian pada masa pemilihan *mid-term* 2014 beberapa nama yang sangat getol dalam oposisi ratifikasi *Arms Trade Treaty* juga mendapatkan dukungan dari *National Rifle Association*.

Tabel 5: Daftar nama penerima dana dukungan dari National Rifle Association dalam masa mid-term election 2014

Name	Office	Total Contribution
Cornyn, John (R-Texas)	Senate	\$9,900
McConnell, Mitch (R-Kentucky)	Senate	\$9,900
Roberts, Pat (R-Kansas)	Senate	\$9,900
Cochran, Thad (R-Mississippi)	Senate	\$9,900
Inhofe, James M (R-Oklahoma)	Senate	\$9,450
Scott, Tim (R-SC)	Senate	\$8,950
Enzi, Mike (R-Wyoming)	Senate	\$4,950
Risch, James E (R-Idaho)	Senate	\$4,000
Hoeven, John (R-North Dakota)	Senate	\$1,000
Sessions, Jeff (R-Alabama)	Senate	\$1,000
Ayotte, Kelly (R-New Hampshire)	Senate	\$500

Sumber: (Center for Responsive Politics, 2014)

Beberapa nama seperti Ted Cochran, Ted Cruz dan James Inhofe bahkan mendapatkan *Grade A+* oleh *National Rifle Association* bahkan mereka tetap dapat bertahan di Senat Amerika Serikat melewati masa *mid-term election*.

Dengan data dan pembahasan diatas, menjadi jelas bagaimana cara *National Rifle Association* mempengaruhi Kongres Amerika Serikat dalam pengambilan keputusannya mengenai isu ratifikasi dari *Arms Trade Treaty*.

PENUTUP

Dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh *National Rifle Association*, kelompok ini berusaha mempengaruhi pemerintahan dengan mempengaruhi orang yang memiliki posisi dipemerintahan. Gayung bersambut, anggota Senat yang membutuhkan *electoral support* kemudian membantu mewujudkan kepentingan dari *National Rifle Association*, yaitu menolak ratifikasi dari *Arms Trade Treaty*. Terbukti dari sejak Amerika Serikat menandatangani perjanjian tersebut hingga akhir tahun 2015, *Arms Trade Treaty* tidak juga diratifikasi oleh Amerika Serikat akibat penolakan oleh Senat yang mendapatkan pengaruh oleh *National Rifle Association*.

DAFTAR PUSTAKA

Arungbudoyo, W. (2015, Oktober 2). Retrieved from okezone.com:

<http://news.okezone.com/read/2015/10/02/18/1224801/rentetan-kejadian-penembakan-di-as-sepanjang-2015>

Center for Responsive Politics. (2012). *National Rifle Assn*. Retrieved from Open Secret:

<https://www.opensecrets.org/orgs/recips.php?id=D000000082&type=P&state=&sort=A&cycle=2012>

Center for Responsive Politics. (2014). *National Rifle Assn*. Retrieved from OpenSecrets.org - Center for Responsive Politics :

<https://www.opensecrets.org/orgs/recips.php?id=D000000082&type=P&state=&sort=A&cycle=2014>

Center for Resposive Politics. (2012). *National Rifle Assn*. Retrieved from OpenSecrets.org - Center for Responsive Politics :

<https://www.opensecrets.org/orgs/recips.php?id=D000000082&type=P&state=&sort=A&cycle=2012>

- Convention on the Right of the Child. (2016). *How Does the United States Ratify Treaties?* Retrieved from The Campaign for U.S. Ratification of the Convention on the Rights of the Child (CRC):
<http://childrightscampaign.org/why-ratify/how-does-the-united-states-ratify-treaties>
- Cox, R. (2013, march 23). *Senate votes 53-46 to stop US from joining UN Arms Trade Treaty*. Retrieved from The Hill: <http://thehill.com/blogs/floor-action/senate/290001-senate-votes-to-stop-us-from-joining-un-arms-treaty>
- Desilver, D. (2015, May 6). *Fact Tank - Our Lives in Numbers*. Retrieved from Pew Research Center: <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/05/06/u-s-voter-turnout-trails-most-developed-countries/#comments>
- Human Rights Watch. (n.d.). U.S. Ratification Process for International Treaties. Human Rights Watch.
- James M. Inhofe. (2013). *Sens. Inhofe, Moran, Manchin and Half of Senate to White House: U.S. Will Not Be Bound By U.N. Arms Trade Treaty*. Washington, D.C.: Senate.
- Jerry Moran. (2014). *Sen. Moran: Omnibus Prevents Implementation of U.N. Arms Trade Treaty*. Washington, D.C.: Senate.
- Jerry Moran. (2015). *Sens. Moran, Inhofe Lead Freshman Senators in Telling White House Senate Opposition to U.N. Arms Trade Treaty Remains Strong*. Washington, D.C.: Senate.
- Kerry, J. (2013). *Remarks at the Arms Trade Treaty Signing Ceremony*. New York City: U.S. Department of State.
- Lawson, K. (Ed.). (2004). *Political Parties and Democracy*. Oxon.

- McElwee, S. (2015, July 27). *Most americans dont vote in elections heres why*. Retrieved from Al Jazeera America:
<http://america.aljazeera.com/opinions/2015/7/most-americans-dont-vote-in-elections-heres-why.html>
- Prof. Dr. Bambang Cipto, M. (2003). *Politik dan Pemerintahan Amerika*. Yogyakarta: Lingkaran Buku.
- U.S. Department of Justice. (2013, September 25). *Arms Trade Treaty*. Retrieved from U.S. Department of Justice Diplomacy in Action:
<http://www.state.gov/t/isn/armstradetreaty/>
- William D. Coplin, Mercedes Marbun. (2003). *Pengantar Politik Internasional*. Bandung: Sinar Baru.